



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



dishub@bangkalankab.go.id



031 - 3097441



@BangkalanDishub



[dishub_bangkalan](https://www.instagram.com/dishub_bangkalan)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS PERHUBUNGAN

Tahun 2023



DINAS PERHUBUNGAN

Tahun 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisasi Anggaran	40
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DINAS PERHUBUNGAN merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DINAS PERHUBUNGAN. Kinerja DINAS PERHUBUNGAN diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan DINAS PERHUBUNGAN pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 17 Januari 2024


DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN

MOAWI ARIFIN, S.STP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 198002121998101001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DINAS PERHUBUNGAN selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka

di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut DINAS PERHUBUNGAN diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

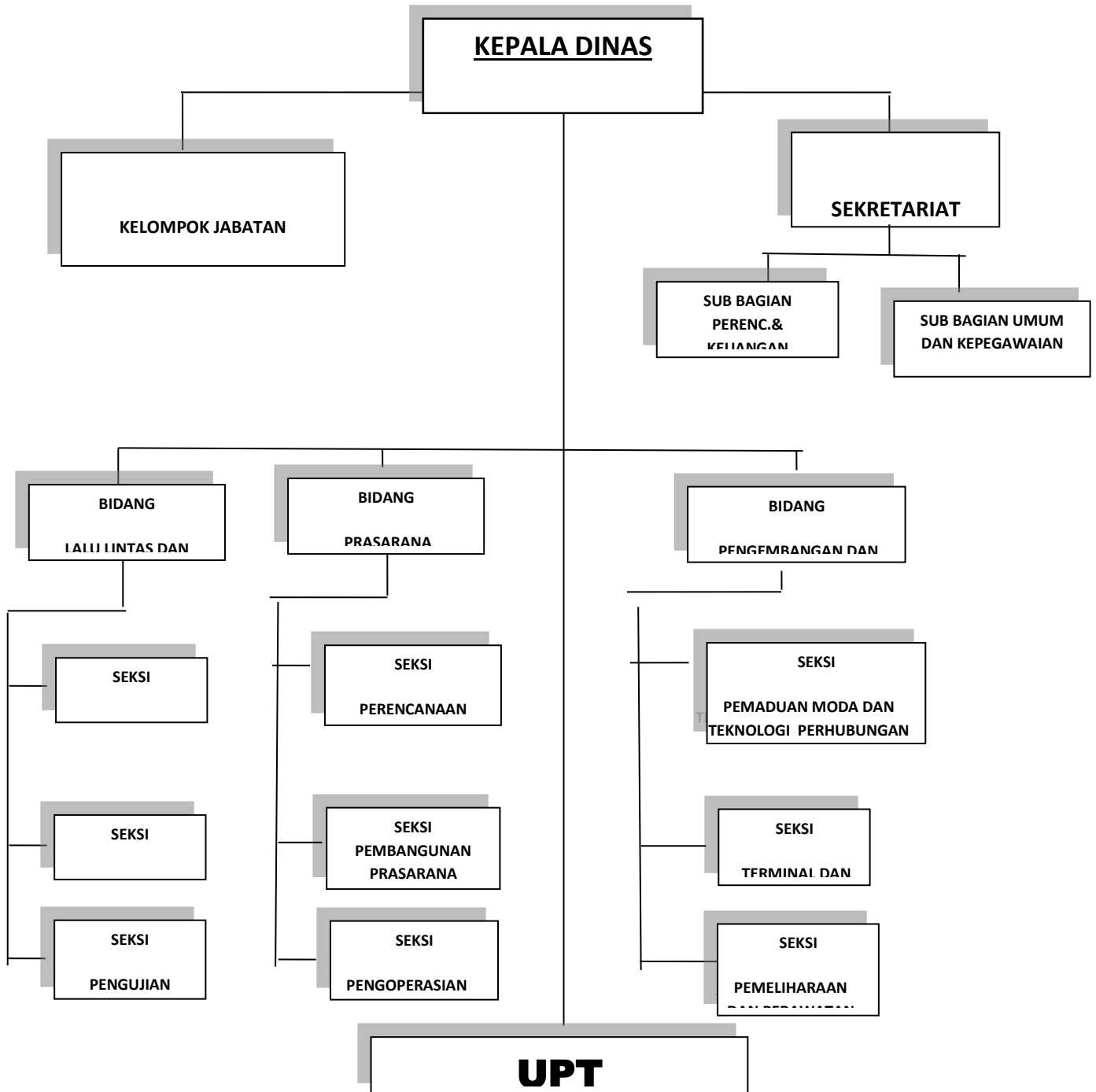
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah bidang perhubungan.
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang perhubungan.
- c. pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang perhubungan.
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi DINAS PERHUBUNGAN .

Gambar 1.1.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN



Gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra DINAS PERHUBUNGAN periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan fungsi perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan lokal sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
2. Rencana pengembangan kelas terminal penumpang adalah terminal Bangkalan tipe A dengan fungsi sebagai terminal utama melayani antar kota propinsi. Terminal ini direncanakan di kawasan interchange yang terletak di desa Masaran Kecamatan Tragah;
3. Meningkatkan sarana prasarana terminal tipe C dalam rangka pemberian pelayanan jasa angkutan umum;
4. Meningkatkan ketersediaan lahan parkir dan SDM juru parkir guna intersifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD;
5. Peningkatan kinerja pelayanan angkutan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
6. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan (sistem lalu lintas dan angkutan jalan) yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peningkatan dan pemanfaatan kinerja ruas jalan;
8. Peningkatan kinerja lalu lintas jalan;
9. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang diiringi oleh TI;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra DINAS PERHUBUNGAN periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan fungsi perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan lokal sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
2. Rencana pengembangan kelas terminal penumpang adalah terminal Bangkalan tipe A dengan fungsi sebagai terminal utama melayani antar kota propinsi. Terminal ini direncanakan di kawasan interchange yang terletak di desa Masaran Kecamatan Tragah;
3. Meningkatkan sarana prasarana terminal tipe C dalam rangka pemberian pelayanan jasa angkutan umum;
4. Meningkatkan ketersediaan lahan parkir dan SDM juru parkir guna intersifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD;
5. Peningkatan kinerja pelayanan angkutan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
6. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan (sistem lalu lintas dan angkutan jalan) yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peningkatan dan pemanfaatan kinerja ruas jalan;
8. Peningkatan kinerja lalu lintas jalan;
9. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang diiringi oleh TI;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja DINAS PERHUBUNGAN ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 TAHUN 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DINAS PERHUBUNGAN adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DINAS PERHUBUNGAN. Rencana Strategis DINAS PERHUBUNGAN yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis DINAS PERHUBUNGAN dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra DINAS PERHUBUNGAN tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra DINAS PERHUBUNGAN telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra DINAS PERHUBUNGAN merupakan hasil kesepakatan bersama antara DINAS PERHUBUNGAN dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra DINAS PERHUBUNGAN tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja DINAS PERHUBUNGAN dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah . Visi Kabupaten Bangkalan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan
Sejahtera Berbasis Potensi Lokal”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 tersebut diatas maka dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kehidupan keagamaan
2. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Berintegras Tinggi
3. Meningkatkan pelayanan dasar, tata kelola potensi ekonomi, social dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi

Perumusan tujuan dan sasaran DINAS PERHUBUNGAN mengacu pada Misi ke-5, yaitu :

**“Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan
berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi”**

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun 2018-2023 sebanyak 2 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DINAS PERHUBUNGAN sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
DINAS PERHUBUNGAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	2.1 Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	0	60	65	75.67	76.33
2	Meningkatnya kinerja urusan perhubungan	2.2 Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	0	75	79.50	80	80

Sumber : Renstra DINAS PERHUBUNGAN periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama DINAS PERHUBUNGAN tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
DINAS PERHUBUNGAN

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	1.1 Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase	- Jumlah sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang diperoleh dari Realisasi jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/ kota. - Sedangkan untuk jumlah kebutuhan sarana prasarana perhubungan diperoleh dari data target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten/ kota.	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana Perhubungan}} \times 100\%$	① Bidang Prasarana dan Sarana perhubungan ② Bidang Lalu Lintas dan Angkutan ③ Bidang Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan

2	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	2.1	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	persentase		$\frac{\text{Jumlah Ketercapaian Indikator Seluruh Kegiatan di Sekretariat}}{\text{Jumlah kegiatan di Sekretariat}} \times 100$	Sekretariat
---	--	-----	--	------------	--	---	-------------

Sumber : Indikator Kinerja Utama DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2023

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2023
DINAS PERHUBUNGAN

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	1.1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	prosentase	78.33
2	Meningkatnya kinerja urusan perhubungan	2.2	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	persentase	80.00

Sumber : Rencana Kerja DINAS PERHUBUNGAN tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian DINAS PERHUBUNGAN

Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 31 bulan 10 tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala DINAS PERHUBUNGAN telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78.33
2	Meningkatnya kinerja urusan perhubungan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	80

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan DINAS PERHUBUNGAN:

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan Dinas Perhubungan	80
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	80
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	80
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	80
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	80
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	80
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi LLAJ yang tersusun	100
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	90

3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terminal yang tersusun	0
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	95
5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melaksanakan uji berkala	98
6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	90
9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketercapaian rencana pengadaan sarana dan prasarana transportasi	0
14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum yang layak fungsi	78.33
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78.33
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1

		Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4

1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0

2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0
1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	41

2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	0
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1
2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2
3	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	13

1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS PERHUBUNGAN selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS PERHUBUNGAN yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi DINAS PERHUBUNGAN .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini DINAS PERHUBUNGAN dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama DINAS PERHUBUNGAN.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, DINAS PERHUBUNGAN juga melakukan

reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DINAS PERHUBUNGAN tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80%	80%	80%	Tinggi	Renstra
2	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78.33	80.39	102.63	Sangat Tinggi	Renja
3	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	80	80	100	Sangat tinggi	Renja

Uraian penjelasan tabel:

1. Target pada indikator Prosentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik untuk tahun 2023 adalah sebesar 80% dengan realisasi sebesar 80 % sehingga capaiannya sebesar 80 %
2. **sasaran meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik** dengan target **78,33 %** yang diperoleh dari rencana realisasi

pengadaan sarana dan prasarana perhubungan sebanyak 111 unit dari total rencana kebutuhan pengadaan sebanyak 142 unit. Dengan realisasi di tahun 2023 sebanyak **80,39 %**, yang diperoleh dari realisasi pengadaan sarana dan prasarana perhubungan sebanyak 41 unit dari perhitungan ulang kebutuhan sebanyak 51 unit. maka sasaran berada pada kategori “**sangat tinggi**” sebesar **102,63%**

3. **Sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan** dengan target **80%** pada tahun 2023. Target tersebut diperoleh dari perkiraan kegiatan kesekretarian yang dilaksanakan yaitu 7 kegiatan dari total 8 kegiatan. Sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar **80 %** telah memenuhi target disebabkan karena kegiatan kesekretarian terlaksana 7 kegiatan. Dari hasil tersebut diperoleh nilai rata rata pencapaian sebesar **100 %** maka sasaran masih berada pada kategori “**sangat tinggi**”

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun 2023		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80%	80%	80%	80%	80%	80
2	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	75	76.76	78	78.33	80.39	102.63
3	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	79.50	79.87	80	80	80	100

Uraian penjelasan tabel:

1. Indikator Kinerja "**Prosentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik**" yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 terealisasi 80%. Jika di bandingkan dengan Tahun 2023 terealisasi 80%.
2. Sasaran pertama "**Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik**". Adapun keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dari indikator yang telah ditetapkan yaitu Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik, pencapaian target pada indikator sasaran ini "**sangat berhasil**" dengan presentase pencapaian target sebesar **102,63%**. Dikarenakan pada tahun 2022 ada perubahan indicator kinerja atas nomenklatur baru, maka dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2022) yang memperoleh hasil capaian sebesar **78%** hal ini menunjukkan bahwa capaian indicator kinerja dari tahun ke tahun berikutnya mengalami kenaikan.
3. Sasaran kedua "**Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan**" Adapun keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran ini dapat diukur dari indikator yang telah ditetapkan yaitu Persentase terpenuhinya penunjang urusan Dinas perhubungan. Pencapaian target pada indikator sasaran ini "**sangat berhasil**" dengan presentase pencapaian target sebesar **100%**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (Tahun 2022) sebesar **80%** dengan capaian indikator kinerja sebesar **100%** maka dapat disimpulkan bahwa capaian memenuhi target yang telah ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja dari tahun ke tahun berikutnya mengalami kenaikan capaiannya.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS PERHUBUNGAN periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5 \times 100$
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80%	80%	100
2	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	80.39	78.33	102.63
3	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	80	80	100

Uraian penjelasan tabel:

1. Indikator Kinerja **Prosentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik** pada tahun 2023 terealisasi sebesar 80 %. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 80 %, maka tingkat kemajuan kerjanya mencapai 100 %.
2. Indikator Kinerja **Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik** pada tahun 2023 terealisasi sebesar 80.39 %. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 78.33%, maka tingkat kemajuan kerjanya mencapai 102.63 %.
3. Indikator Kinerja **Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan** pada tahun 2023 terealisasi sebesar 80 %. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 80 %, maka tingkat kemajuan kerjanya mencapai 100 %.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80		
2	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	80.39		
3	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	80		

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78.33	80.39	102.63	1. Adanya keselarasan antara perencanaan, penganggaran dan komitmen seluruh pihak untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan target kinerja. 2. Kinerja dipenuhi dg pemenuhan anggaran, penyiapan SDM yg berkecimpung pada aspek sarpras (sertifikat), adanya kondisi khusus dari tokoh masyarakat dalam perbaikan sarpras, sarpras perhubungan berdasarkan musrenbang, melihat kebijakan sarpras dari pusat berkaitan dengan sarpras yg baik, menampung layanan perhubungan dengan responsif	1. Meningkatkan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang sesuai standar. 2. Dibutuhkan pemeliharaan, penyempurnaan indikator kinerja di RPJMD lebih representatis, usulan ke kementerian perhubungan berupa DAK yg mengatur masalah pemeliharaan dan pengadaan sarpras perhubungan, termasuk Bantuan Keuangan Provinsi, usulan masyarakat melalui forum musrenbang

2	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	80	80	100	1. Peningkatan pelayanan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien. 2. Kinerja dipenuhi dg pemenuhan anggaran, penyiapan SDM yg berkecimpung pada aspek sarpras (sertifikat), adanya kondisi khusus dari tokoh masyarakat dalam perbaikan sarpras, sarpras perhubungan berdasarkan musrenbang, melihat kebijakan sarpras dari pusat berkaitan dengan sarpras yg baik, menampung layanan perhubungan dengan responsif.	1. Pelayanan lebih ditingkatkan lagi 2. Dibutuhkan pemeliharaan, penyempurnaan indikator kinerja di RPJMD lebih representatis, usulan ke kementerian perhubungan berupa DAK yg mengatur masalah pemeliharaan dan pengadaan sarpras perhubungan, termasuk Bantuan Keuangan Provinsi, usulan masyarakat melalui forum musrenbang
---	--	--	----	----	-----	---	--

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan tabel 3.6 diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik pada tahun 2023 indikator yang tergolong sangat tinggi ada 2.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan Dinas Perhubungan	98.66	Menunjang
1.1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.41	Menunjang
1.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.46	Menunjang
1.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	Menunjang
1.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	
1.1.4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	99.99	Menunjang
1.1.5				Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	100	Menunjang

				Perubahan DPA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
1.1.6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Menunjang
1.1.7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.80	Menunjang
1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98.27	Menunjang
1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98.27	Menunjang
1.2.2				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Menunjang
1.3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	75.69	Menunjang
1.3.1				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	75.69	Menunjang

					Daerah pada SKPD		
1.6				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	98.41	Menunjang
1.6.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
1.6.3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
1.6.4				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	98.64	Menunjang
1.6.5				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	89.76	Menunjang
1.6.6				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.05	Menunjang
1.7				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	81.43	Menunjang
1.7.2				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	81.43	Menunjang
1.8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	99.64	Menunjang

1.8.1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	99.21	Menunjang
1.8.2				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	99.66	Menunjang
1.9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	93.07	Menunjang
1.9.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	94.70	Menunjang
1.9.2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	89.58	Menunjang
1.9.5				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Menunjang
2	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik		PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	99.46	Menunjang

2.2				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	99.58	Menunjang
2.2.1				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	99.59	Menunjang
2.2.2				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	97.51	Menunjang
2.2.3				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terminal yang tersusun	-	
2.3.1				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	-	
2.4				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	98.82	Menunjang
2.4.1				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	98.82	Menunjang
2.5				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melaksanakan uji berkala	97.41	Menunjang

2.5.1				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	97.41	Menunjang
2.6				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	96.43	Menunjang
2.6.1				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	87.21	Menunjang
2.6.2				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	97.91	Menunjang
2.6.3				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	96.55	Menunjang
2.14				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum yang layak fungsi	100	Menunjang
2.14.1				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	100	Menunjang

				Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		
--	--	--	--	--	---	--	--

Uraian penjelasan tabel :

1. Pada indikator **Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan Dinas Perhubungan** menunjukkan pencapaian 80% dari target 80%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 98.66%.
 - 1.1 Pada indikator Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peraturan yang dihasilkan menunjukkan pencapaian 90% dari target 100%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 86.41%
 - 1.1.1. Pada indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah menunjukkan pencapaian 2 dokumen dari target 2 dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 98.46%
 - 1.1.2. Pada indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD menunjukkan pencapaian 1 dokumen dari target 1 dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
 - 1.1.3. Pada indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah menunjukkan pencapaian - dokumen dari target 1 dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 0%
 - 1.1.4. Pada indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD menunjukkan pencapaian 1 dokumen dari target 1 dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 99.99%
 - 1.1.5. Pada indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD menunjukkan pencapaian 1 dokumen dari target 1 dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%

- 1.1.6. Pada indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD menunjukkan pencapaian 3 laporan dari target 3 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
- 1.1.7. Pada indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menunjukkan pencapaian 2 laporan dari target 2 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 76.80%
- 1.2 Pada indikator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah menunjukkan pencapaian 100% dari target 100%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 98.27%
- 1.2.1 Pada indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN menunjukkan pencapaian 105 orang/bln dari target 105 orang/bln, sehingga prosentase pencapaian sebesar 98.27%
- 1.2.2 Pada indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD menunjukkan pencapaian 1 laporan dari target 1 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
- 1.3 Pada indikator Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan menunjukkan pencapaian 80% dari target 80%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 75.69%
- 1.3.1 Pada indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD menunjukkan pencapaian 4 laporan dari target 4 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 75.69%
- 1.4 Pada indikator Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan menunjukkan pencapaian 80% dari target 80%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 98.41%
- 1.4.1 Pada indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan menunjukkan pencapaian 5 paket dari target 5 paket, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
- 1.4.2 Pada indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan menunjukkan pencapaian 1 paket dari target 1 paket, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%

- 1.4.3 Pada indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan menunjukkan pencapaian 6 paket dari target 6 paket, sehingga prosentase pencapaian sebesar 98.64%
- 1.4.4 Pada indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan menunjukkan pencapaian 4 dokumen dari target 4 dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 89.76%
- 1.4.5 Pada indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan menunjukkan pencapaian 25 laporan dari target 25 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 98.05%
- 1.5 Pada indikator Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan menunjukkan pencapaian 80% dari target 80%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 81.43%
 - 1.5.1 Pada indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan menunjukkan pencapaian 5 paket dari target 5 paket, sehingga prosentase pencapaian sebesar 81.43%
- 1.6 Pada indikator Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan menunjukkan pencapaian 80% dari target 80%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 99.64%
 - 1.6.1 Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan menunjukkan pencapaian 3 laporan dari target 3 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 99.21%
 - 1.6.2 Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan menunjukkan pencapaian 6 laporan dari target 6 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 99.66%
- 1.7 Pada indikator Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan menunjukkan pencapaian 80% dari target 80%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 93.07%
 - 1.7.1 Pada indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya menunjukkan pencapaian 8 unit dari target 8 unit, sehingga prosentase pencapaian sebesar 94.70%

- 1.7.2 Pada indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya menunjukkan pencapaian 5 unit dari target 3 unit, sehingga prosentase pencapaian sebesar 89.58%
- 1.7.3 Pada indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi menunjukkan pencapaian 23 unit dari target 23 unit, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
2. Pada indikator **Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik** menunjukkan pencapaian 25.37% dari target 78.33%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 99.46%.
 - 2.1 Pada indikator Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan menunjukkan pencapaian 80.34% dari target 90%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 99.58%
 - 2.1.1 Pada indikator Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota menunjukkan pencapaian 35 unit dari target 41 unit, sehingga prosentase pencapaian sebesar 99.59%
 - 2.1.2 Pada indikator Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara menunjukkan pencapaian 11 unit dari target 11 unit, sehingga prosentase pencapaian sebesar 97.51%
 - 2.2 Pada indikator Persentase Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terminal yang tersusun menunjukkan pencapaian 0% dari target 100%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 0%
 - 2.2.1 Pada indikator Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara menunjukkan pencapaian 0 unit dari target 0 unit, sehingga prosentase pencapaian sebesar 0%
 - 2.3 Pada indikator Persentase Titik Parkir yang dikelola menunjukkan pencapaian 100% dari target 95%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 98.82%
 - 2.3.1 Pada indikator Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota menunjukkan pencapaian 12 laporan dari target 12 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 98.82%
 - 2.4 Pada indikator Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melaksanakan uji berkala menunjukkan pencapaian 100% dari target 100%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 97.41%

- 2.4.1 Pada indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara menunjukkan pencapaian 10 unit dari target 10 unit, sehingga prosentase pencapaian sebesar 97.41%
- 2.5 Pada indikator Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan menunjukkan pencapaian 90% dari target 90%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 96.43%
- 2.5.1 Pada indikator Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota menunjukkan pencapaian 1 laporan dari target 1 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 87.21%
- 2.5.2 Pada indikator Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menunjukkan pencapaian 2 unit dari target 2 unit, sehingga prosentase pencapaian sebesar 97.91%
- 2.5.3 Pada indikator Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota menunjukkan pencapaian 13 laporan dari target 13 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 96.55%
- 2.6 Pada indikator Persentase angkutan umum yang layak fungsi menunjukkan pencapaian 17.67% dari target 78.33%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
- 2.6.1 Pada indikator Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota menunjukkan pencapaian 1 laporan dari target 1 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.510.929.698	12.343.036.494	98.66
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.967.653	20.709.950	86.41
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.602.668.875	7.471.041.406	98.27
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.481.000	1.121.000	75.69
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	466.495.607	459.092.877	98.41
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.835.678	12.080.000	81.43
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.297.701.385	4.282.407.441	99.64
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.779.500	96.583.820	93.07
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17.910.575.666	17.814.212.246	99.46
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15.581.478.957	15.516.661.146	99.58
3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	0	0	0
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.124.311.334	2.099.201.600	98.82
5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	55.999.500	54.550.000	97.41

6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	139.785.875	134.799.500	96.43
14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000	9.000.000	100

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78.33	80.39	102.63	17.910.575.666	17.814.212.246	99.46	0,54
2	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	80	80	100	12.510.929.698	12.343.036.494	98.66	1,34

Uraian penjelasan tabel:

1. Untuk pencapaian sasaran 1 (satu) yaitu Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik terealisasi anggaran sebesar **Rp 17.814.212.246** atau **99.46%** dari total pagu sebesar **Rp 17.910.575.666**. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **0.54%** dari pagu yang dianggarkan yaitu sebesar **Rp 96.363.420**. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai sehingga dengan demikian terdapat efisiensi.
2. Untuk pencapaian sasaran 2 (dua) yaitu Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan terealisasi anggaran sebesar **Rp 12.343.036.494** atau **98.66%** dari total pagu sebesar **Rp 12.510.929.698**. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **1.34%** dari pagu yang dianggarkan yaitu sebesar **Rp 167.893.204**. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target nilai tercapai.

Persentase efisiensi ini untuk 2 sasaran tersebut secara teori cukup memuaskan, sehingga dapat dirumuskan bahwa pada tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS PERHUBUNGAN ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS PERHUBUNGAN kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Bangkalan, 17 Januari 2024

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN



MOAWI ARIFIN, S.STP., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 198002121998101001

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2023 Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS PERHUBUNGAN dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 DINAS PERHUBUNGAN menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar **80%** (kategori baik)
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar **80.39.%** (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar **80%** (kategori sangat tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 30.421.505.364** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp 30.157.248.740**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar **99.13%** dan nilai efisiensi anggaran sebesar **0.87%**.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS PERHUBUNGAN ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS PERHUBUNGAN kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Bangkalan, 17 Januari 2024
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN



MOAWI ARIFIN, S.STP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 198002121998101001



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. RE.Martadinata Telp/ Fax. (031) 3097441
B A N G K A L A N

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 050 / 049-2 / 433.111/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama yang diantaranya harus mempertimbangkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 39 Tahun 2018 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023
- Ketiga** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan Pelaksana Kegiatan;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 09 Februari 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN**



MOAWI ARIFIN, S.STP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 198002121998101001

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2021-2023

Tujuan	sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan(Output) (Tahun 2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Unit Kerja PD Penanggungjawab	LOKASI				
							2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19	20				
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Saranadan Prasarana Perhubungan yangterpasang dan berfungsi dengan baik	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											Dinas Perhubungan					
			2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAANLALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	75,67%	15,401,468,620	76,33%	13,229,249,165	78,33%	14,984,980,250	78,33 %	42,498,357,510							
			2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	prosentase ketercapaian rencana pengadaan sarana dan prasarana transportasi	85%	-	0%	-	95%	1,198,827,050	95%	1,198,827,050							
				Penyediaan Angkutan Umum untukJasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengadaan angkutan minibus	0 unit	0	unit	-			0	unit	-						
					Jumlah lokasi pembangunan jalan desa	3 lokasi								-						
					Jumlah pengadaan tambatan perahu	-			0	lokasi	-	1	lokasi	1,198,827,050			1	lokasi	1,198,827,050	
			2.15.02.2.14	Penerbitan Izin PenyelenggaraanAngkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum yanglayak fungsi	75,67%	-	76,33%	100,000,000	78,33%	100,000,000	80%	200,000,000							
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orangdalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah operasional dan pemeliharaan bus sekolah	1 unit	0	unit	-	1	unit	70,000,000	1	unit			70,000,000	1	unit	140,000,000
					Jumlah pengembangan Izin Trayekyang dilaksanakan	0 kali	0	kali	-	2	kali	30,000,000	2	kali			30,000,000	4	kali	60,000,000
			2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melaksanakan uji berkala	80%	170,812,000	90%	291,840,000	98%	83,740,000	100%	546,392,000							
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara/dirawat	10 unit	10	unit	30,000,000	10	unit	30,000,000	10	unit	30,000,000	30	unit	90,000,000					
Jumlah kegiatan kalibrasi yang dilaksanakan		1 keg	1	keg	25,000,000	1	kali	25,000,000	1	keg	25,000,000	3	keg	75,000,000						
Jumlah kegiatan rehabilitasi balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan		1 keg	0	keg	-	1	keg	38,740,000	1	keg	28,740,000	2	keg	67,480,000						
				Penyediaan Sarana dan PrasaranaPengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah pengadaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 paket	1	paket	115,812,000	1	paket	198,100,000	0	paket	-	2	paket	313,912,000		

Tujuan	sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan(Output) (Tahun 2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	LOKASI		
							2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19	20				
			2.15.02.2. 04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola		86%	1,565,910,600	90%	1,664,564,400	95%	1,500,000,000	95%	4,730,475,000						
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penertiban parkir yang di laksanakan	2 keg	3	keg	1,565,910,600	4	keg	1,664,564,400	4	keg	1,500,000,000	11	keg	4,730,475,000		
			2.15.02.2. 03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terminal yang Tersusun		100%	77,258,750	100%	204,142,080	100%	200,000,000	100%	481,400,830						
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah jenis fasilitas prasarana terminal yang dipelihara	0 keg	0	jenis	-	1	keg	204,142,080	3	jenis	200,000,000	4	jenis	404,142,080		
				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Perhubungan yang Tersusun	0 dok	1	dok	77,258,750	0	dok	-	1	dok	-	2	dok	77,258,750		
			2.15.02.2. 02	Penyediaan Perlengkapan Jalandi Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan		80%	12,450,242,895	85%	9,508,391,535	90%	10,677,208,200	90%	32,635,842,630						
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah panjang jalan yang diberi marka jalan	0 meter	0	meter	-	2500	meter	140,381,000	4312.25	meter	120,000,000	6812.25	meter	260,381,000		
					jumlah rambu yang terpasang	0 buah	0	buah	-	68	buah	60,875,060	75	buah	132,903,686	143	buah	193,778,746		
					Jumlah panjang Pagar Pengaman Jalan yang terpasang	0 meter	0	meter	-	0	meter	-	0	meter	-	0	meter	-		
					Jumlah Traffic cone dan water block yang diadakan	0 buah	0		-	0	buah	-	95	buah	50,000,000	95	buah	50,000,000		
					Jumlah Warning Lamp yang terpasang	0 unit	0		-	0	unit	-	1	unit	120,000,000	1	unit	120,000,000		
					Jumlah PCTL yang terpasang	0 unit	1	unit	130,417,909	1	unit	150,000,000	1	unit	125,000,000	3	unit	405,417,909		
					Jumlah Operasional PJU yang terpasang dan terpelihara	2 keg	2	keg	12,217,490,103	12	bulan	8,811,846,805	2	keg	9,911,809,914	16	keg	30,941,146,822		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	jumlah halte yang dipelihara	6 lokasi	0	lokasi	-	6	lokasi	27,494,600	6	lokasi	27,494,600	12	lokasi	54,989,200		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah lokasi rambu-rambu yang akan dipelihara	40 unit	37	unit	12,034,883	20	unit	49,778,270	40	unit	70,000,000	97	unit	131,813,153		
					Jumlah warning lamp,flashing light dan PCTL yang dipelihara	0 keg	1	unit	90,300,000	1	unit	120,000,000	1	unit	120,000,000	3	unit	330,300,000		
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan PJU yang terpasang		100%	263,993,000	1	lokasi	148,015,800									
			2.15.02.2. 01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi LLAJ yang tersusun		0	bulan	-	100%	340,063,650	100%	190,000,000	100%	530,063,650					
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional Website OPD	8 bulan	50	orang	72,510,800	12	bulan	39,600,000	12	bulan	50,000,000	74	bulan	162,110,800		
					Jumlah Sosialisasi Keselamatan Jalan yang dilaksanakan	0 orang	3	dok	191,482,200	100	orang	97,083,650	100	orang	95,000,000	203	orang	383,565,850		

Tujuan	sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output) (Tahun 2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	LOKASI		
							2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19	20				
					Jumlah Dokumen Perencanaan di Bidang Transportasi yang tersusun	2 dok	80%	873,251,375	2	dok	203,380,000	2	dok	45,000,000	4.8	dok	1,121,631,375			
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	2	keg	19,903,850	85%	1,120,247,500	90%	1,035,205,000	90%	2,175,356,350						
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan forum yang di laksanakan	0 keg	1	keg	412,287,525	2	keg	50,600,000	2	keg	65,000,000	5	keg	527,887,525		
				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Jumlah kegiatan ATCS yang dilaksanakan	1 keg	0	-	-	1	keg	608,025,000	1	keg	488,205,000	2	keg	1,096,230,000		
				Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah command center yang diadakan	-	2	keg	-	0	paket	-	0	-	1	paket	-			
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan persiapan Angkutan lebaran yang dilaksanakan	0 kali	5	keg	441,060,000	2	keg	36,000,000	2	keg	42,600,000	9	keg	519,660,000		
					Jumlah operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	5 keg			5	keg	425,622,500	5	keg	439,400,000	10	keg	865,022,500			
Meningkatnya kinerja urusan perhubungan	Persentase ketercapaian kinerja program urusan perhubungan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan Dinas Perhubungan		80,00%	14,167,149,748	80,00%	15,519,884,508	80,00%	16,074,885,673	80,00%	37,316,561,106	Dinas Perhubungan					
			2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa penunjang operasional OPD		100%	5,721,790,925	100%	6,208,231,135	100%	6,238,230,000	100%	17,826,171,135						
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 jenis	6	jenis	5,379,710,000	6	jenis	5,739,630,000	6	jenis	5,739,630,000	16	jenis	11,821,340,925		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis	4	jenis	342,080,925	4	jenis	468,601,135	4	jenis	498,600,000	8.93	jenis	1,494,705,885		
			2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana aparatur yang menunjang Tupoksi SKPD		93%	527,504,750	95%	637,809,450	98%	878,205,300	100%	1,543,084,750						
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 kali	14	kali	27,070,000	20	kali	33,465,000	25	kali	88,080,000	47	kali	122,183,650		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis	2	jenis	638,650	4	jenis	5,000,000	4	jenis	5,000,000	9	jenis	43,993,750		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 jenis	1	jenis	33,993,750	5	jenis	33,993,750	5	jenis	33,993,750	12	jenis	76,987,500		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 jenis	2	jenis	9,000,000	2	jenis	42,600,000	2	jenis	42,600,000	10	jenis	515,877,350		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 jenis	6	jenis	430,677,350	6	jenis	494,090,700	6	jenis	678,531,550	15	jenis	1,198,747,250		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 jenis	3	jenis	26,125,000	4	jenis	28,660,000	3	jenis	30,000,000	8	jenis	62,160,000		

Tujuan	sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output) (Tahun 2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	LOKASI
							2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19	20		
			2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun		100%	3,500,000	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	100%	13,500,000				
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	4 dok	4 dok	3,500,000	4 dok	5,000,000	4 dok	5,000,000	9 dok	195,009,028				
			2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	185,009,028	100 %	401,594,450	100 %	521,708,000	100%	979,817,684				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	8 unit	8 unit	56,515,234	9 unit	157,491,250	8 unit	250,000,000	20 unit	468,597,044				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 unit	3 unit	61,105,794	3 unit	114,320,000	3 unit	114,320,000	6 unit	228,640,000				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	0 unit	-	1 unit	52,395,200	1 unit	80,000,000	2 unit	132,395,200				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	0 unit	-	1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	25 unit	87,388,000				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	23 unit	23 unit	67,388,000	23 unit	67,388,000	23 unit	67,388,000	46.85 unit	222,383,250				
			2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang diadakan selama 1 tahun		85%	87,607,250	90%	131,614,000	95%	268,258,600	100%	459,196,500				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	3 jenis	3 jenis	59,323,900	4 jenis	70,791,150	6 jenis	118,258,600	10 jenis	189,049,750				
					Jumlah software yang diadakan				0 jenis	-			1 jenis	28,283,350				
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	0 unit	1 unit	28,283,350	1 unit	28,283,350	1 unit	150,000,000	2 unit	178,283,350				
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	0 unit	0 unit	-	4 unit	32,539,500	0 unit	-	5 unit	338,113,650				
			2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pakaian Aparatur yang Diadakan		100%	305,574,150	100 %	305,834,150	100 %	315,834,150	100%	784,027,050				
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Aparatur yang Diadakan	168 buah	168 buah	162,358,750	168 buah	162,358,750	230 buah	162,358,750	448 buah	467,932,900				
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120 pegawai	50 pegawai	143,215,400	60 pegawai	143,475,400	50 pegawai	153,475,400	111 pegawai	358,768,550				

Tujuan	sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output) (Tahun 2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	LOKASI		
							2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun tepat waktu		100%	61,817,750	100%	69,338,450	100%	87,186,750	100%	7,487,807,845						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	4 dok	4	dok	4,881,000	3	dok	7,151,700	4	dok	25,000,000	8	dok	32,851,700		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD yang Tersusun	0 dok	1	dok	700,000	1	dok	1,000,000	1	dok	1,000,000	3	dok	2,458,000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKAOPD yang Tersusun	0 dok	1	dok	458,000	1	dok	1,000,000	1	dok	1,000,000	3	dok	3,000,000		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD yang Tersusun	0 dok	1	dok	1,000,000	1	dok	1,000,000	1	dok	1,000,000	3	dok	2,500,000		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPAOPD yang Tersusun	0 dok	1	dok	500,000	1	dok	2,000,000	1	dok	2,000,000	5	dok	6,837,000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dok	3	dok	2,837,000	3	dok	5,000,000	3	dok	5,000,000	11	dok	61,441,750		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 laporan	5	laporan	51,441,750	5	laporan	52,186,750	5	laporan	52,186,750	11	laporan	7,378,719,395		
			2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		100%	7,274,345,895	100%	7,760,462,873	100%	7,760,462,873	100%	15,520,925,746						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun Mingguan/Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	132 laporan	0	laporan	-	132	laporan	1,000,000	132	laporan	1,000,000	265	laporan	2,540,193		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1	laporan	540,193	1	laporan	5,000,000	1	laporan	5,000,000	111	laporan	7,283,805,702		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	109 orang/bln	109	orang/bln	7,273,805,702	112	orang/bln	7,754,462,873	112	orang/bln	7,754,462,873	224	orang/bln	45,077,544,114		
								29,568,618,368			28,749,133,673		31,059,865,923			89,377,617,964				



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**DINAS PERHUBUNGAN
KAB. BANGKALAN**

dishub@bangkalankab.go.id



031 - 3097441



@BangkalanDishub



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOAWI ARIFIN, S.STP, MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. MOHNI, MM**
Jabatan : **Plt. BUPATI BANGKALAN**

(Selaku atasan langsung pihak pertama)

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. BUPATI BANGKALAN


Drs. H. MOHNI, MM

Bangkalan, Januari 2023
Pihak Pertama,


MOAWI ARIFIN, S.STP, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PERHUBUNGAN KAB.BANGKALAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%
2	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	80,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	13.199.210.222,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	14.376.258.760,00	APBD
	J U M L A H	27.575.468.982,00	

Pt. BUPATI BANGKALAN



DRS. H. MOHNI, MM

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



MOAWI ARIFIN, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAHRUS, SH.,MM**
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOAWI ARIFIN, S.STP, MM**
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
(Selaku atasan langsung pihak pertama)

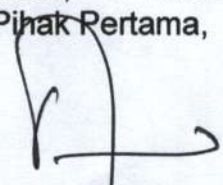
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MOAWI ARIFIN, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

Bangkalan, Januari 2023
Pihak Pertama,

MAHRUS, SH.,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19660622 199330 2 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN KAB.BANGKALAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	80,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	13.199.210.222,00	APBD
	JUMLAH	13.199.210.222,00	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN



MOAWI ARIFIN, S.STP, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN

MAHRUS, SH., MM

Pembina Tk.I
NIP. 19660622 1993302 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NASRUL FAUZI, S. IP**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PRASARANA**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOAWI ARIFIN, S.STP, MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


MOAWI ARIFIN, S.STP, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

Bangkalan, Januari 2023
Pihak Pertama,


NASRUL FAUZI, S. IP

Penata Tk.I
NIP. 19820720 201101 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PRASARANA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.484.546.035,00	APBD
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100.000.000,00	APBD
	J U M L A H	11.584.546.035,00	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN



MOAWI ARIFIN, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

KEPALA BIDANG PRASARANA


NASRUL FAUZI, S. IP
Penata Tk.I
NIP. 19820720 201101 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LUKMAN HAKIM, S.STP., MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOAWI ARIFIN, S.STP, MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MOAWI ARIFIN, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

Bangkalan, Januari 2023
Pihak Pertama,


LUKMAN HAKIM, S.STP., MM
Penata Tk.I
NIP. 19891221 201010 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENGEMB. DAN KESELAMATAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	63.648.125,00	APBD
	J U M L A H	63.648.125,00	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN



MOAWL ARIFIN, S.STP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

KEPALA BIDANG PENGEMB. DAN
KESELAMATAN

LUKMAN HAKIM, S.STP., MM
Penata Tk.I
NIP. 19891221 201010 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF EKA PUTRA,SH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOAWI ARIFIN,S.STP,MM**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MOAWI ARIFIN,S.STP,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

Bangkalan, Januari 2023
Pihak Pertama,


ARIEF EKA PUTRA,SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760115 200501 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG LALIN DAN ANGKUTAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

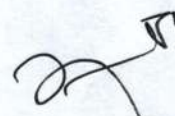
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengujian berkala kendaraan bermotor	55.999.500,00	APBD
2	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalin untuk jaringan jalan kabupaten/kota	107.550.500,00	APBD
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.500.000,00	APBD
	J U M L A H	174,050,000.00	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN


MOAWI ARIFIN, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

KEPALA BIDANG LALIN DAN
ANGKUTAN


ARIEF EKA PUTRA, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760115 200501 1 007

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRFAN HIDAYAT, SE**
Jabatan : **KEPALA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOAWI ARIFIN, S.STP, MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**
(Selaku atasan langsung pihak pertama)

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, Januari 2023
Pihak Pertama,

IRFAN HIDAYAT, SE
Penata Tk.I

NIP. 197106152008011014

Pihak Kedua,



MOAWI ARIFIN, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB.BANGKALAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78.33 %

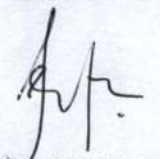
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.554.014.600,00	APBD
	JUMLAH	2.554.014.600,00	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN




MOAWI ARIFIN, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

KEPALA UPTD PENGELOLA
PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN


IRFAN HIDAYAT, SE
Penata Muda Tk.I
NIP. 197106152008011014

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENKKY AGUNG RACHMUDO,ST**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHRUS, SH.,MM**

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MAHRUS, SH.,MM

Pembina Tk.I

NIP. 19660622/1993302 1 001

Bangkalan, Januari 2023

Pihak Pertama,

HENKKY AGUNG RACHMUDO,ST

Penata Tk.I

NIP. 19790109 200604 1 011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	80,00 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,741,650.00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,869,313,374.00	APBD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,758,062,000.00	APBD
	J U M L A H	12,673,117,024.00	

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN

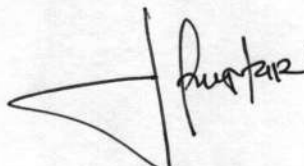


MAHRUS, SH., MM

Pembina Tk.I

NIP.19660622 1993302 1 001

KASUBBAG PERENC. DAN KEUANGAN



HENKKY AGUNG RACHMUDO, ST

Penata Tk.I

NIP.19750223 199803 2 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOEROEL AINI,SE**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHRUS, SH.,MM**

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, Januari 2023

Pihak Kedua,

MAHRUS, SH.,MM

Pembina Tk.I

NIP. 19660622 1993302 1 001

Pihak Pertama,

NOEROEL AINI,SE

Penata Tk.I

NIP. 19670329 199302 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	80,00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	3,729,250.00	APBD
2	Administrasi umum perangkat daerah	382,347,948,00	APBD
3	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	140,016,000.00	APBD
	J U M L A H	526,093,198.00	

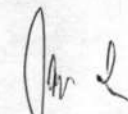
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN


MAHRUS, SH., MM

Pembina Tk.I

NIP.19660622 1993302 1 001

KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


NOEROEL AINI, SE

Penata Tk.I

NIP.19670329 199302 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : -
Jabatan : -

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIEF EKA PUTRA,SH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**

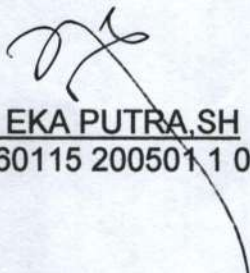
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bangkalan, Januari 2023
Pihak Pertama,


ARIEF EKA PUTRA,SH
NIP.19760115 200501 1 007

-
NIP.-

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PENGUJIAN SARANA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	55,999,500.00	APBD
	J U M L A H	55,999,500.00	

KABID LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

DINAS PERHUBUNGAN


ARIEF EKA PUTRA, SH
Penata Tingkat I
NIP.19760115 200501 1 007

NIP.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R.ACHMAT RUPAWANSYAH,SE**
Jabatan : **KEPALA SEKSI ANGKUTAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIEF EKA PUTRA,SH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ARIEF EKA PUTRA,SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760115 200501 1 007

Bangkalan, Januari 2023
Pihak Pertama,

R.ACHMAT RUPAWANSYAH,SE
Penata
NIP. 19810625 200212 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI ANGKUTAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

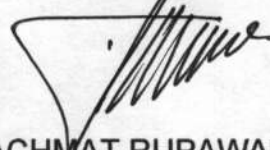
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78.33 %

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	10,500,000.00	APBD
	J U M L A H	10,500,000.00	

KABID LALU LINTAS DAN ANGKUTAN


ARIEF EKA PUTRA,SH
Penata Tingkat I
NIP.19760115 200501 1 007

KASI ANGKUTAN


R.ACHMAT RUPAWANSYAH,SE
Penata
NIP.19810625 200212 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOH.SYAIFUL ROHMAN,SH.,MM**
Jabatan : **KEPALA SEKSI LALU LINTAS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIEF EKA PUTRA,SH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ARIEF EKA PUTRA,SH
Penata Tingkat I
NIP.19760115 200501 1 007

Bangkalan, Januari 2023
Pihak Pertama,

MOH.SYAIFUL ROHMAN,SH.,MM
Penata Tingkat I
NIP.19750617 201001 1 002

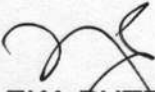
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

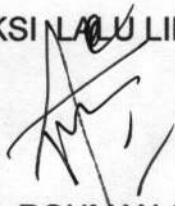
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78.33 %

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	107,550,500.00	APBD
	J U M L A H	107,550,500.00	

KABID LALU LINTAS DAN ANGKUTAN


ARIEF EKA RUTRA, SH
Penata Tingkat I
NIP.19760115 200501 1 007

KEPALA SEKSI LALU LINTAS


MOH. SYAIFUL ROHMAN, SH., MM
Penata Tingkat I
NIP.19750617 201001 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUR AINI, SE**

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN PRASARANA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NASRUL FAUZI, S. IP**

Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA

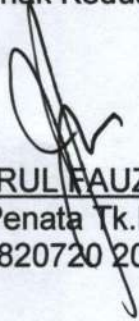
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


NASRUL FAUZI, S. IP
Penata Tk.I
NIP. 19820720 201101 1 002

Bangkalan, Januari 2023

Pihak Pertama,


NUR AINI, SE
Penata Muda Tk.I
NIP. 19780810 200903 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	100.000.000,00	APBD
2	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	11.477.285.465,00	APBD
	J U M L A H	11.577.285.465,00	

KEPALA BIDANG PRASARANA


NASRUL FAUZI, S. IP
Penata Tk.I
NIP. 19820720 201101 1 002

KASI PEMBANGUNAN PRASARANA


NUR AINI, SE
Penata Muda Tk.I
NIP. 19780810 200903 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : -

Jabatan : KEPALA SEKSI PERENCANAAN PRASARANA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NASRUL FAUZI, S. IP**

Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, Januari 2023
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

NASRUL FAUZI, S. IP

Penata Tk.I

NIP. 19820720 201101 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

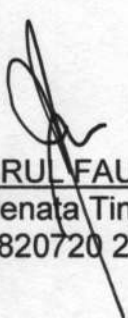
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	-	-	-
	J U M L A H	-	

KABID PRASARANA

KASI PERENCANAAN
PRASARANA


NASRUL FAUZI, S. IP
Penata Tingkat I
NIP. 19820720 201101 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EMY HENDRAWATI, S.Sos., MM**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN PRASARANA**
Selanjutnya disebut pihak pertama

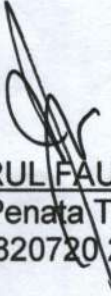
Nama : **NASRUL FAUZI, S. IP**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PRASARANA**
(Selaku atasan langsung pihak pertama)

Selanjutnya disebut pihak kedua

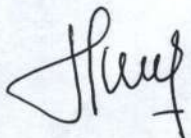
Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


NASRUL FAUZI, S. IP
Penata Tk.I
NIP. 19820720 201101 1 002

Bangkalan, Januari 2023
Pihak Pertama,


EMY HENDRAWATI, S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19750223 199803 2 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN PRASARANA
DINAS PERHUBUNGAN KAB.BANGKALAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	7.260.570,00	APBD
	JUMLAH	7.260.570,00	

KEPALA BIDANG PRASARANA


NASRUL FAUZI, S. IP
Penata Tingkat I
NIP. 19820720 201101 1 002

KASI PENGOPERASIAN PRASARANA


EMY HENDRAWATI, S.Sos.MM
Pembina
NIP. 19750223 199803 2 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOH.MOHID,S.Sos ., MSi**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS PERHUBUNGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LUKMAN HAKIM, S.STP., MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

LUKMAN HAKIM, S.STP., MM

Penata Tk.I

NIP. 19891221 201010 1 001

Bangkalan, Januari 2023

Pihak Pertama,

MOH.MOHID,S.Sos.,Msi

Penata

NIP. 19820501 200604 1 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78.33%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	5.025.250,00	APBD
	J U M L A H	5.025.250,00	

KABID PENGEMB. DAN KESELAMATAN



LUKMAN HAKIM, S.STP., MM
Penata Tk.I
NIP. 19891221 201010 1 001

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PERHUBUNGAN



MOH.MOHID, S.Sos.Msi
Penata
NIP.19820501 200604 1 010

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAKHMATULLAH AMIRIL,ST**
Jabatan : **KEPALA SEKSI KESELAMATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LUKMAN HAKIM, S.STP., MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

LUKMAN HAKIM, S.STP., MM
Penata Tk.I
NIP. 19891221 201010 1 001

Bangkalan, Januari 2023
Pihak Pertama,

RAKHMATULLAH AMIRIL,ST
Penata
NIP. 19800912 201001 1 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%

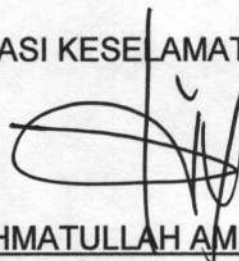
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	58.622.875,00	APBD
	J U M L A H	58.622.875,00	

KABID PENGEMB.DAN KESELAMATAN



LUKMAN HAKIM, S.STP., MM
Penata Tk.I
NIP. 19891221 201010 1 001

KASI KESELAMATAN



RAKHMATULLAH AMIRIL, ST
Penata
NIP.19800912 201001 1 010

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ELLYANI SUTANTI,SE**

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI
PERHUBUNGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LUKMAN HAKIM, S.STP., MM**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

LUKMAN HAKIM, S.STP., MM

Penata Tk.I

NIP. 19891221 201010 1 001

Bangkalan, Januari 2023
Pertama,

ELLYANI SUTANTI,SE

Penata

NIP. 19771017 201001 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/kota	-	APBD
	J U M L A H	-	

KABID PENGEMB. DAN KESELAMATAN



LUKMAN HAKIM, S.STP., MM
Penata Tk.I
NIP. 19891221 201010 1 001

KASI PEMADUAN MODA DAN
TEKNOLOGI PERHUBUNGAN



ELLYANI SUTANTI, SE
Penata
NIP. 19771017 201001 2 006

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. RACHMAD SANTOSO, SH**
Jabatan : KTU UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IRFAN HIDAYAT, SE**
Jabatan : KEPALA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN (**Selaku atasan langsung pihak pertama**)

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

IRFAN HIDAYAT, SE
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19710615 200801 1 014

Bangkalan, Januari 2023
Pihak Pertama,

A. RACHMAD SANTOSO, SH
Penata Tk.I
NIP. 19700227 200801 1 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**DINAS PERHUBUNGAN
KAB. BANGKALAN**

dishub@bangkalankab.go.id



031 - 3097441



@BangkalanDishub



dishub bangkalan





DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOAWI ARIFIN, S.STP, MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. ARIEF M. EDIE., M.Si**
Jabatan : **Pj. BUPATI BANGKALAN**

(Selaku atasan langsung pihak pertama)

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Pj. BUPATI BANGKALAN
Dr. H. ARIEF M. EDIE., M.Si

Bangkalan, Oktober 2023
Pihak Pertama,

MOAWI ARIFIN, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KAB.BANGKALAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%
2	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	80,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	12,510,929,698	APBD
2	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	17,910,575,666	APBD
	J U M L A H	30,421,505,364	



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN





**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAHRUS, SH.,MM**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOAWI ARIFIN,S.STP,MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**
(Selaku atasan langsung pihak pertama)

Selanjutnya disebut pihak kedua

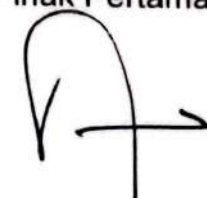
Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


MOAWI ARIFIN,S.STP,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

Bangkalan, Oktober 2023
Pihak Pertama,


MAHRUS, SH.,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19660622 199330 2 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN KAB.BANGKALAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80 %
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	80,00

<u>NO</u>	<u>KEGIATAN</u>	<u>ANGGARAN</u>
1.1	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,967,65
1.2	Administrasi Keuangan	7,602,668,875
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,481,000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	466,495,607
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14,835,678
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,297,701,385
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103,779,500
JUMLAH		12,510,929,698

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN


MOAWI ARIFIN, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN


MAHRUS, SH., MM
Pembina Tk.I
NIP. 19660622 1993302 1 001

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **NASRUL FAUZI, S. IP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PRASARANA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOAWI ARIFIN, S.STP, MM**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



MOAWI ARIFIN, S. STP, MM
Paralelisme Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

Bangkalan, Oktober 2023
Pihak Pertama,



NASRUL FAUZI, S. IP
Penata Tk. I
NIP. 19820720 201101 1 002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BIDANG PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80 %
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	90%
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	41 unit
1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	11 unit

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15,581,478,957
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15,559,815,787
1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	21,663,170
J U M L A H		15,581,478,957

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN


MOAWI ARIFIN, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

KEPALA BIDANG PRASARANA


NASRUL FAUZI, S. IP
Penata Tk.I
NIP. 19820720 201101 1 002

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LUKMAN HAKIM, S.STP., MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOAWI ARIFIN, S.STP, MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MOAWI ARIFIN, S.STP, MM
Pemuda Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

Bangkalan, Oktober 2023
Pihak Pertama,

LUKMAN HAKIM, S.STP., MM
Penata Tk.I
NIP. 19891221 201010 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80 %
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%
1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	90%
1.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan
1.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen	8 titik

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	27,356,375
1.1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.025.250
1.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	22.331.125
J U M L A H		27,356,375

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN


MOAWLARIFIN, S.STP., MM
Penata Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DAN KESELAMATAN


LUKMAN HAKIM, S.STP., MM
Penata Tk.I
NIP. 19891221 201010 1 001

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF EKA PUTRA,SH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOAWI ARIFIN,S.STP,MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



MOAWI ARIFIN,S.STP,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

Bangkalan, Oktober 2023
Pihak Pertama,



ARIEF EKA PUTRA,SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760115 200501 1 007

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BIDANG LALIN DAN ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80 %
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%
1.1	Pengujian berkala kendaraan bermotor	Persentase Peningkatan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melaksanakan uji berkala	98 %
1.2	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalin untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	90 %
1.3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	prosentase ketercapaian rencana pengadaan sarana dan prasarana transportasi	78.33%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengujian berkala kendaraan bermotor	55,999,500
2	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalin untuk jaringan jalan kabupaten/kota	112,429,500
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9,000,000
JUMLAH		177,429,000


 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BANGKALAN
 MOAWI, ARIFIN, S.STP, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19800212 199810 1 001

KEPALA BIDANG LALIN DAN
 ANGKUTAN


 ARIEF EKA PUTRA, SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 19760115 200501 1 007

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRFAN HIDAYAT, SE**
Jabatan : **KEPALA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOAWI ARIFIN, S.STP, MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**
(Selaku atasan langsung pihak pertama)

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MOAWI ARIFIN, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

Bangkalan, Oktober 2023
Pihak Pertama,


IRFAN HIDAYAT, SE
Penata Tk.I
NIP. 197106152008011014

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KAB.BANGKALAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80 %
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78.33 %
1.1	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	95%

<u>NO</u>	<u>KEGIATAN</u>	<u>ANGGARAN</u>
1.1	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2,124,311,334
JUMLAH		2,124,311,334

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN


MOAWI ARIFIN, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 1 001

KEPALA UPTD PENGELOLA
PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN


IRFAN HIDAYAT, SE
Penata Muda Tk.I
NIP. 197106152008011014

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENKKY AGUNG RACHMUDO,ST**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHRUS, SH.,MM**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MAHRUS, SH.,MM
Pembina Tk.I

NIP. 19660622 1993302 1 001

Bangkalan, Oktober 2023
Pihak Pertama,

HENKKY AGUNG RACHMUDO ST
Penata Tk.I

NIP. 19790109 200604 1 011

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
2	Meningkatnya kinerja urusan perhubungan	Persentase ketercapaian kinerja program urusan perhubungan	100 %
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	80,00 %
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun tepat waktu	100%
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen
2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	3 Laporan
2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 org/bln
2.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan

2.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa penunjang operasional OPD	100 %
2.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
2.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan

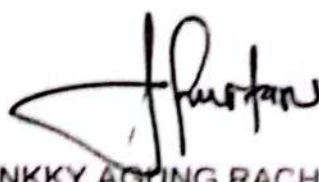
NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.967.653
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.485.300
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.746.500
2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	237.500
2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	3.806.353
2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.112.250
2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.725.750
2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.854.000
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.602.668.875
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.600.808.875
2.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.860.000
2.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.297.701.385
2.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.168.385
2.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.109.533.000
JUMLAH		11,924,337,913

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN


MAHRUS, SH., MM
Pembina Tk.I

NIP.19660622 1993302 1 001

KASUBBAG PERENC.DAN KEUANGAN


HENKKY ADUNG RACHMUDO, ST
Penata Tk.I

NIP.19750223 199803 2 004

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOEROEL AINI,SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHRUS, SH.,MM**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, Oktober 2023

Pihak Kedua,

MAHRUS, SH., MM
Pembina Tk.I

NIP. 19660622 1993302 1 001

Pihak Pertama,

NOEROEL AINI, SE
Penata Tk.I

NIP. 19670329 199302 2 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80 %
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	80,00
1.1	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun	100 %
1.1.1	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan
1.2	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase sarana aparatur yang Menunjang Tupoksi SKPD	98%
1.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket
1.2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
1.2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket
1.2.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen
1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang diadakan selama 1 tahun	100 %
1.3.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 paket

1.4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit
1.4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit
1.4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 unit

<u>NO</u>	<u>KEGIATAN</u>	<u>ANGGARAN (Rp)</u>
1.1	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1,481,000
1.1.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,481,000
1.2	Administrasi umum perangkat daerah	466,495,607
1.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.771.650
1.2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.846.850
1.2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	417.894.250
1.2.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.750.000
1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.232.857
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14,835,678
1.3.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.835.678
1.4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	103,779,500
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.066.500
1.4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.183.000

1.4.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

16.530.000

J U M L A H

571,756,107

**SEKRETARIS DINAS
PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN**



MAHRUS, SH., MM

Pembina Tk.I

NIP.19660622 1993302 1 001

**KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**



NOEROEL AINI, SE

Penata Tk.I

NIP.19670329 199302 2 001

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EMY HENDRAWATI, S.Sos., MM**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN PRASARANA**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NASRUL FAUZI, S. IP**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PRASARANA**
(Selaku atasan langsung pihak pertama)

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bangkalan, Oktober 2023
Pihak Pertama,


NASRUL FAUZI, S. IP
Penata Tk.I
NIP. 19820720 201101 1 002


EMY HENDRAWATI, S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19750223 199803 2 004

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN KAB.BANGKALAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80 %
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	90 %
1.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	11 unit

<u>NO</u>	<u>SUB KEGIATAN</u>	<u>ANGGARAN</u>
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	21,663,170
1.1.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	21,663,170
JUMLAH		21,663,170

KEPALA BIDANG PRASARANA


NASRUL FAUZI, S. IP

Penata Tingkat I

NIP. 19820720-201101 1 002

KASI PENGOPERASIAN
PRASARANA


EMY HENDRAWATI, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19750223 199803 2 004

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUR AINI, SE**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN PRASARANA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NASRUL FAUZI, S. IP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PRASARANA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

NASRUL FAUZI, S. IP

Penata Tk.I

NIP. 19820720201101 1 002

Bangkalan, Oktober 2023

Pihak Pertama,

NUR AINI, SE

Penata Muda Tk.I

NIP. 19780810 200903 2 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80 %
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	90 %
1.1.1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	41 unit

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15,559,815,787
1.1.1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	15,559,815,787
J U M L A H		15,559,815,787

KEPALA BIDANG PRASARANA



NASRUL FAUZI, S. IP
Penata Tk.I
NIP. 19820720 201101 1 002

KASI PEMBANGUNAN
PRASARANA



NUR AINI, SE
Penata Muda Tk.I
NIP. 19780810 200903 2 001

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EMY HENDRAWATI, S.Sos., MM**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN PRASARANA**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NASRUL FAUZI, S. IP**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PRASARANA**
(Selaku atasan langsung pihak pertama)

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bangkalan, Oktober 2023
Pihak Pertama,

NASRUL FAUZI, S. IP
Peraja Tk.I
NIP. 19820720 201101 1 002

EMY HENDRAWATI, S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19750223 199803 2 004

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN KAB.BANGKALAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80 %
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	90 %
1.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	11 unit

NO

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota

21,663,170

1.1.1 Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan

21,663,170

JUMLAH

21,663,170

KEPALA BIDANG PRASARANA


NASRUL FAUZI, S. IP

Penata Tingkat I

NIP. 19820720 201101 1 002

KASI PENGOPERASIAN
PRASARANA


EMY HENDRAWATI, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19750223 199803 2 004

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAKHMATULLAH AMIRIL,ST**
Jabatan : **KEPALA SEKSI KESELAMATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LUKMAN HAKIM, S.STP., MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

LUKMAN HAKIM, S.STP., MM
Penata Tk.I
NIP. 19891221 201010 1 001

Bangkalan, Oktober 2023
Pihak Pertama,

RAKHMATULLAH AMIRIL,ST
Penata
NIP. 19800912 201001 1 010

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80 %
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%
1.1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	90 %
1.1.1	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	8 titik

NO SUB KEGIATAN

1.1 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

ANGGARAN (Rp)

22,331,125

1.1.1 Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas

22,331,125

J U M L A H

22,331,125

KABID PENGEMB.DAN KESELAMATAN



LUKMAN HAKIM, S.STP., MM

Penata Tk.I

NIP. 19891221 201010 1 001

KASI KESELAMATAN



RAKHMATULLAH AMIRIL, ST

Penata

NIP.19800912 201001 1 010

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ELLYANI SUTANTI,SE**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI
PERHUBUNGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LUKMAN HAKIM, S.STP., MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

LUKMAN HAKIM, S.STP., MM

Penata Tk.I

NIP. 19891221 201010 1 001

Bangkalan, Oktober 2023
Pertama,

ELLYANI SUTANTI,SE

Penata

NIP. 19771017 201001 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80 %
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%
1.1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	90 %
1.1.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.025.250,00
1.1.1	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	5.025.250,00
J U M L A H		5.025.250,00

KABID PENGEMB. DAN KESELAMATAN



LUKMAN HAKIM, S.STP., MM
Penata Tk.I
NIP. 19891221 201010 1 001

KASI PEMADUAN MODA DAN
TEKNOLOGI PERHUBUNGAN



ELLYANI SUTANTI, SE
Penata
NIP. 19771017 201001 2 006

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **R.ACHMAT RUPAWANSYAH,SE**

Jabatan : **KEPALA SEKSI ANGKUTAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIEF EKA PUTRA,SH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

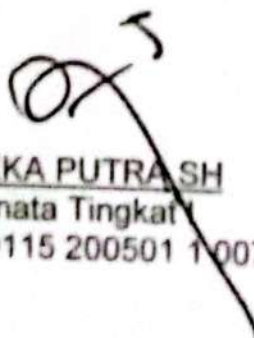
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bangkalan, Oktober 2023
Pihak Pertama,


ARIEF EKA PUTRA,SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760115 200501 1 007


R.ACHMAT RUPAWANSYAH,SE

Penata

NIP. 19810625 200212 1 003

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

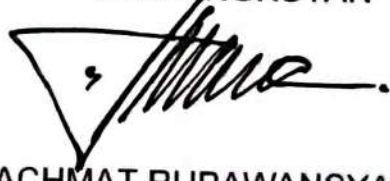
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI ANGKUTAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80 %
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78.33 %
1.1	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	prosentase ketercapaian rencana pengadaan sarana dan prasarana transportasi	78.33 %
1.1.1	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.1	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9,000,000
1.1.1	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	9,000,000
J U M L A H		9,000,000

KABID LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**KASI ANGKUTAN**


ARIEF EKA PUTRA SH
Penata Tingkat I
NIP.19760115 200501 1 007


R. ACHMAT RUPAWANSYAH, SE
Penata
NIP.19810625 200212 1 003

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOH.SYAIFUL ROHMAN,SH.,MM**
Jabatan : **KEPALA SEKSI LALU LINTAS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIEF EKA PUTRA,SH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


ARIEF EKA PUTRA,SH
Penata Tingkat I
NIP.19760115 200501 1 007

Bangkalan, Oktober 2023
Pihak Pertama,


MOH.SYAIFUL ROHMAN,SH.,MM
Penata Tingkat I
NIP.19750617 201001 1 002

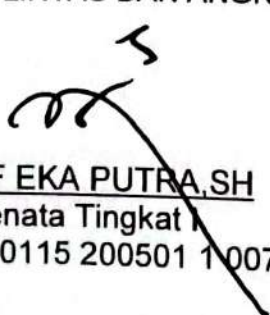
LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA SEKSI LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80 %
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78.33 %
1.1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	90 %
1.1.1	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	13 Laporan

<u>NO</u>	<u>SUB KEGIATAN</u>	<u>ANGGARAN (Rp)</u>
1.1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	112,429,500
1.1.1	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	112,429,500
J U M L A H		112,429,500

KABID LALU LINTAS DAN ANGKUTAN


ARIEF EKA PUTRA, SH
Penata Tingkat I
NIP.19760115 200501 1 007

KEPALA SEKSI LALU LINTAS


MOH. SYAIFUL ROHMAN, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP.19750617 201001 1 002

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : -
Jabatan : -

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIEF EKA PUTRA,SH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bangkalan, Januari 2023
Pihak Pertama,


ARIEF EKA PUTRA,SH
NIP.19760115 200501 1 007

-
NIP.-

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. RACHMAD SANTOSO, SH**
Jabatan : **KTU UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IRFAN HIDAYAT, SE**
Jabatan : **KEPALA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN**
(Selaku atasan langsung pihak pertama)

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

IRFAN HIDAYAT, SE
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19710615 200801 1 014

Bangkalan, Oktober 2023
Pihak Pertama,

A. RACHMAD SANTOSO, SH
Penata Tk.I
NIP. 19700227 200801 1 005

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KAB.BANGKALAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80 %
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78.33 %
1.1	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	95 %
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan

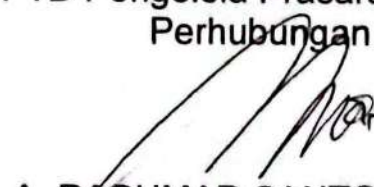
<u>NO</u>	<u>SUB KEGIATAN</u>	<u>ANGGARAN</u>
1.1	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2,124,311,334
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2,124,311,334
JUMLAH		2,124,311,334

KEPALA UPTD PENGELOLA
PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN



IRFAN HIDAYAT, SE
Penata Muda Tk.I
NIP. 19710615 200801 1 014

KEPALA TATA USAHA
UPTD Pengelola Prasarana Teknis
Perhubungan



A. RACHMAD SANTOSO, SH
Penata Tk.I
NIP. 19700227 200801 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB.BANGKALAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78.33 %

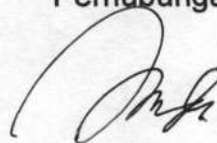
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.588.136.671,00	APBD
	JUMLAH	2.588.136.671,00	

KEPALA UPTD PENGELOLA
PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN



IRFAN HIDAYAT, SE
Penata Muda Tk.I
NIP. 19710615 200801 1 014

KEPALA TATA USAHA
UPTD Pengelola Prasarana Teknis
Perhubungan



A. RACHMAD SANTOSO, SH
Penata Tk.I
NIP. 19700227 200801 1 005